



## ANALISIS KONFLIK SOSIAL PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SUNGAI KUNYIT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Alam Mahadika\*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the emergence of social conflicts caused by the construction of the Kijing International Port which is located in Sungai Kunyit Village, Mempawah Regency, West Kalimantan. The data was collected by means of conducting literature studies and field observations. The results found, among others. Community residential land was evicted and turned into land for the construction of the Kijing International Port. There is a potential for loss of community jobs as fishermen and farmers because their lost waters and land are turned into the Kijing Port. The emergence of damage to community settlements due to the port construction process. Low compensation for community land. Insistence from the development party to sell people's land quickly. So this research suggests a multi-stakeholder dialogue that needs to be carried out so that conflicts can be resolved properly and with direction.*

*Keywords: villagers; social conflict; development.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis munculnya konflik sosial yang diakibatkan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yang terletak di Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik melakukan studi pustaka dan observasi ke lapangan. Hasil yang ditemukan antara lain. Lahan pemukiman masyarakat digusur dan dijadikan lahan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Ada potensi kehilangan pekerjaan masyarakat sebagai nelayan dan petani karena perairan dan lahan mereka yang hilang dijadikan Pelabuhan Kijing. Munculnya kerusakan pemukiman masyarakat yang diakibatkan proses pembangunan pelabuhan. Rendahnya kompensasi dari lahan masyarakat. Desakan pihak pembangunan agar lahan masyarakat cepat terjual. Maka penelitian ini menyarankan adanya sebuah dialog multi-stakeholders yang perlu dilakukan agar konflik bisa diselesaikan dengan baik dan terarah.

Kata Kunci: masyarakat desa; konflik sosial; pembangunan.

## PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini analisis terjadinya konflik sosial antara masyarakat Desa Sungai Kunyit dan PT. Pelindo, konflik terjadi adalah dari kompensasi yang tidak merata dan kompensasi yang kurang terbuka dalam proses pembangunan pelabuhan Internasional Kijing yang terletak di wilayah Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat hal yang terjadi banyak penolakan dari masyarakat yang terdampak. Pembangunan sebagai perubahan sosial berasal dari keadaan tertentu keadaan dipandang lebih bernilai, pembangunan sering didefinisikan sebagai kemajuan yang akan dicapai satu masyarakat dalam bidang ekonomi, bahkan beberapa kondisi saat ini sangat umum pembangunan diartikan sebagai bentuk kehidupan yang kurang baik bagi sebagian orang tersingkir atau orang yang terdampak (Budiman, 1995).

Konflik sosial sebagaimana dijelaskan oleh Turner menunjukkan bahwa secara realistis konflik sosial dapat mengimplementasi kepada ketidaknyamanan pada suatu perspektif, pola-pola dan embrio konflik sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat pada beberapa aspek disebabkan pula oleh masalah ketidaksetaraan (Turner, 1975; Jones, 2016). Jonathan Turner dalam bukunya *The Ritual*

Article History | Submitted: July 3, 2020 | Accepted: August 28, 2020 | Published: August 26, 2020

How to Cite (APA 6<sup>th</sup> Edition style):

Mahadika, A. (2020). Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 4(2), 101-107.

DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2619

\*Correspondance Author: [mahadikaalam@gmail.com](mailto:mahadikaalam@gmail.com)

*Process* memiliki makna satu sisi dalam mengeksploitasikan kelas sosial tertentu di bawah situasi oleh pembangunan dengan eksistensinya yakni senantiasa menimbulkan suatu kepentingan tertentu di bawah situasi yang diciptakan revolusi dalam wilayah organisasi dengan orientasi melawan kelompok dominan dan pemilik modal dalam struktur kelas yang berjalan (Turner, 1996).

Menurut Purnomo, mengatakan bahwa pembangunan adalah cara pandang yang tidak hanya terlihat dari segi pembangunan ekonomi saja tetapi harus juga menggabungkan tiga unsur yaitu keseimbangan ekonomi, keseimbangan sosial dan keseimbangan lingkungan. Pembangunan harus menciptakan suatu kondisi di mana adanya konflik dalam proses pembangunan dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada (Purnomo, 2007; Loucks, 2000). Dalam tulisannya Bebbington, mengungkap bahwa konflik sosial terjadi ada tiga ruang kekuasaan, yaitu kekuasaan masyarakat sipil, kekuasaan negara dan sektor swasta (Bebbington, 1997). Hal ini seperti terjadi dalam proses pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dimana adanya pertikaian antara masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak PT. Pelindo II sebagai pihak pembangunan.

Pelabuhan merupakan daerah perairan yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga kapal sebagai pintu gerbang memperlancar hubungan antar wilayah serta kegunaannya untuk keperluan industri, tambang dan lainnya (Triatmodjo, 2009). Pembangunan Pelabuhan merupakan pembangunan infrastruktur yang berpotensi akan terjadinya konflik lahan karena harus menggusur sumber daya alam sekitar dan memindahkan manusia (Goulet, 2005). Dalam penelitian Nur Faricha tentang konflik pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik yang disebabkan oleh konflik vertikal masing-masing aktor memiliki kepentingan saling bersinggung untuk mendapatkan kepentingan, kolaborasi dilakukan oleh para aktor elite untuk memaksimalkan keuntungan (Faricha, 2016). Penelitian yang mengungkap penyebab terjadi konflik dibalik pembebasan lahan yang menemukan hasil indikasi ketidakberesan dan pelanggaran yang diorientasikan pada praktik-praktik pembebasan lahan serta mengupayakan segala cara untuk mengoptimalkan kepentingan tanpa memperdulikan hak dan kepentingan masyarakat.

Seperti pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu alternatif lokasi pembangunan pelabuhan internasional sebagai lokasi yang paling layak digunakan dengan memiliki aspek 10 penilaian dalam kondisi tempat yang akan dibangun seperti kedalaman pantai, arus dominan, pasang surut, gelombang, sedimentasi, alur pelaran, aksesibilitas, ketersediaan lahan, fasilitas pendukung dan kondisi lahan (Wahono, 2015). Seperti data Tribun Mempawah mengenai data eksekusi 8 rumah warga dan 7 lahan untuk mengembangkan PT Pelindo, banyak penolakan dari warga Sungai Kuyit karena menilai ketidakadilan dari penilaian harga tanah yang dimilikinya hingga PT Pelindo dinilai dalam pembebasan lahan tebang pilih (Tribun Mempawah, 2020). Data dari berita media Ocean Week, pembangunan pelabuhan internasional terus dikebut namun tidaklah mudah, hal itu adanya bukti dari adanya penolakan oleh para warga Kecamatan Sungai Kuyit yang mengancam terhadap realisasi pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing jika tuntutan kompensasi tidak direalisasikan oleh PT. Pelindo dan pemerintah daerah, para nelayan akan terus memperjuangkan haknya karena pembangunan Pelabuhan Kijing menimbulkan dampak negatif kepada nelayan (Oceanweek, 2019). Ada pula data dari Mongabay, sebagai penyiar berita konservasi dan lingkungan alam berbasis non-profit, warga Sungai Kuyit yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing beberapa kali membuat unjuk rasa menuntut persoalan antara pembebasan lahan dan warga juga menuntut pemerintah daerah bertindak tegas seperti memberikan intruksi agar masyarakat mendapatkan haknya terutama dalam menadaptkan pekerjaan serta keberlangsungan hidup dalam jangka yang sangat panjang (Mongabay, 2019). Dalam pembangunan proyek pembangunan, posisi masyarakat dan lingkungan seakan-akan selalu menjadi obyek yang bisa dikorbankan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur (Saparinah, 2019). Berdasarkan uraian latar belakang di atas muncul faktor-faktor suatu permasalahan apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial antara

masyarakat Desa Sungai Kunyit dan PT. Pelindo dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Penelitian ini mengambil di wilayah pesisir pantai Desa Sungai Kunyit yang merupakan tempat strategis para nelayan untuk mencari mata pencaharian yang akan terganggu karena pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, tujuan studi ini bermaksud menyumbangkan hasil data dari warga Sungai Kunyit secara lebih mendasar terkait warga yang terdampak.

## **METODE DAN FOKUS PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kondisi sosial atau menganalisis fenomena yang terjadi pada peristiwa konflik antara masyarakat Desa Sungai Kunyit dan PT. Pelindo II yang terjadi karena pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing (Prastowo, 2011). Dalam penelitian ini diperlukan data keterangan informasi secara umum penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder (Purhantara, 2010). Data primer data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, menggunakan instrument yang telah ditetapkan data primer dianggap lebih akurat karena data disajikan secara terperinci (Indriantoro, 2010). Penelitian primer diperoleh dari hasil wawancara pada masyarakat dari Desa Sungai Kunyit yang terdampak dari Pembangunan Pelabuhan. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai bentuk umumnya seperti data yang berkaitan dengan catatan laporan historis yang sudah dipublikasikan (Supomo, 2010). Teknik pengumpulan data suatu proses pengadaan data untuk langkah yang amat penting dalam metode ilmiah pengumpulan data seperti wawancara yang tidak terstruktur di mana pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar pada permasalahan yang ditanyakan kepada masyarakat Desa Sungai Kunyit yang terdampak, ada pula pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu mencari data dengan mengumpulkan bahan berhubungan masalah yang diteliti untuk memperolehnya dengan cara membaca, dan mendalami literatur-literatur atau studi terdahulu secara relevan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Moehar, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil pembahasan peneliti pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk secara teoritik dengan metode kualitatif deskriptif dan memperoleh data-data dari observasi lapangan, penelitian terdahulu hingga media informasi yang relevan. Pembahasan akan dibahas terkait kajian analisis konflik sosial antara masyarakat Desa Sungai Kunyit dan pihak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Terindikasi bahwa masyarakat Desa Sungai Kunyit yang menolak karena dengan harga kompensasi lahan mereka cukup rendah dan desakan pihak pembangunan agar masyarakat dapat melepaskan lahannya, hingga saat ini kompensasi masih belum maksimal.

### **Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing**

Dikatakan terkait konflik sosial yang muncul akibat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, konflik sosial yang dimaksud ialah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pembangunan pelabuhan karena banyak masyarakat protes menilai biaya pembebasan lahan milik mereka yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh PT. Pelindo.

Data dari Gatra.com, ratusan nelayan Kelong dan Togo asal Desa Sungai Kunyit menggelar aksi ke kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak. Aksi para nelayan tersebut menuntut kompensasi dari pihak PT. Pelindo terkait dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, yang telah mematikan mata pencaharian masyarakat terdampak. Seperti warga Sungai Kunyit berinisial R merupakan nelayan menyebutkan para nelayan menuntut ganti rugi dari pihak PT Pelindo terkait dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, yang membuat hilangnya pata pencaharian. Para nelayan mengaku uang ganti rugi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yang awalnya para nelayan mengungkapkan janji pihak PT. Pelindo, mereka akan diberikan kompensasi hingga

Rp.150.000.000,00.- untuk satu nelayan namun kenyataannya tidak selesai, nelayan hanya mendapatkan Rp.12.000.000,00.- setidaknya ada 62 nelayan Kelong dan 49 nelayan Togo yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing (Gatra.com, 2019; Angah, 2019).

Informasi dari Mongabay, mengenai dampak dari sektor pertanian di Desa Sungai Kunyit, seorang petani berinisial R yang tidak ingin terlibat dengan kehadiran Pelabuhan Internasional Kijing dia ingin menghasilkan panen yang berkualitas hingga produknya bisa bersaing dan berkelanjutan dengan pola tanam organik, dengan harapan yang sama dari Lembaga Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya di Alam Cemerlang Sejahterah Sungai Kunyit yang menginginkan petani – petani menggunakan teknologi modern (Mongabay, 2020). Erni Panca Kurniasih, sebagai dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura, mengatakan pembangunan pelabuhan secara umum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maka seperti perpindahan mata pencaharian tidak terelakan jadi tantangan bagi pemerintah untuk bertindak adil bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan pelabuhan dengan pembinaan cara hidup dalam waktu yang jangka panjang (Kurniasih, 2020; Pahlevi, 2020).

Dalam media mahasiswa Universitas Tanjungpura, seorang warga salah satu dari warga yang juga terdampak menolak dengan tanahnya dirampas oleh pihak PT. Pelindo dengan alasan kompensasi harga yang cukup rendah, sebab tanah yang dimilikinya hanya dihargai tidak lebih dari Rp.332.000,- permeternya (Mimbaruntan, 2019). Rumah salah satu warga tersebut berada di lokasi tanahnya akan dibangun untuk bagian inti dari pelabuhan seperti kantor, tanahnya juga berada di tepian jalan raya sungai kunyit atau jalan utama penghubung lintas kota dan kabupaten (Rahmad, 2019).

Ada seorang warga Desa Sungai Limau yang sudah cukup lama menjadi nelayan dan rata-rata saudara sekitar juga sebagai nelayan warga yang beranggapan pekerjaan nelayan menjadi turun-menurun lantaran untuk menyambung kehidupan dengan hasil laut yang sangat menjanjikan (Mimbaruntan, 2019). Sungguh disayangkan atas permasalahan yang dihadapi sebagai nelayan menjelaskan aktivitas pembangunan pelabuhan berdampak terhadap hasil tangkapan warga sekitar. Warga setempat menyatakan sebelum adanya pembangunan pelabuhan nelayan bisa mendapatkan ikan dan udang lebih dari ratusan kilo. Dalam dari satu hari bisa mencapai Rp.300.000,-. Seorang warga juga menceritakan nelayan di daerah pantai Kijing I yang menjadi pusat pembangunan Pelabuhan Internasional telah lumpuh sejak satu tahun 2019 belakangan ini. Sebagian nelayan sudah mencoba mencari penghasilan baru seperti berdagang bahkan ada yang keluar kota untuk mencari nafkah, saat tahun sekarang 2020 ini tidak ada lagi nelayan yang mencari ikan di daerah Kijing I. menanggapi keluhan masyarakat di Desa Sungai Kunyit terutama sebagai nelayan, kehilangan mata pencaharian memang pasti terjadi dengan adanya pembangunan pelabuhan, ketika pelabuhan sudah jadi tidak semua masyarakat desa bisa bekerja di pelabuhan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja diserap dengan kualitas dan kuantitas terbatas. Seorang warga Sungai Kunyit yang menyatakan ada lapangan kerja yang sudah dijanjikan sekitar 30 orang yang memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam pelatihan satpam atau petugas pengamanan secara gratis khusus masyarakat Desa Sungai Kunyit untuk di pekerjakan di PT. Pelindo II (Tartilawati, 2019).

Berkenaan dengan konflik sosial yang terjadi pada pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, seorang warga yang menyatakan keluhannya.

“Status tanah kami ini belum mendapatkan kesepakatan dan belum mendapatkan kompensasi, hasil dari persidangan konsinyasi sudah berjalan sementara setelah sidang selesai sampai saat ini kami pun belum mendapatkan kompensasinya serta pihak hakim itu sendiri belum menandatangani surat keputusan” (Wawancara dengan seorang warga, 2019).

Pertemuan kompensasi antara masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional Mempawah (BPN), pertemuan kompensasi tersebut membuat masyarakat kecewa.

“Dalam kronologi musyawarah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mempawah mengadakan kompensasi tanpa adanya negosiasi dan kami hanya diberikan kertas amplop seketika kami tidak menerima akan ditindaklanjuti di pengadilan. Dalam pengadilan tersebut diproses secara tertutup dan masyarakat – pun jarang diajak musyawarah” (Wawancara dengan seorang warga, 2019).

Adanya pertemuan yang dilakukan oleh pihak pembangunan kepada masyarakat dan dihadiri oleh Bupati Mempawah:

“Musyawarah pertama di pantai kijing dihadiri oleh Bupati Mempawah yang mempertanyakan persetujuan masyarakat terkait pembangunan pelabuhan tersebut di tanah masyarakat Desa Sungai Kunit, beberapa masyarakat ada yang menyetujui asalkan kompensasi yang diberikan bisa memenuhi hidup kami kedepan. Hingga pertemuan yang kedua Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengadakan identifikasi dan memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat mengukur tanahnya masing-masing. Badan Pertanahan Nasional hanya memberikan instruksi seperti itu serta tidak memberikan patokan di mana lahan kami yang akan dibangun pelabuhan, beberapa minggu kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun lapangan mengumumkan hasil identifikasi lahan yang isinya bangunan tanam tumbuh masyarakat di mana lahan tersebut kurang relevan ketika akan dibangun (Wawancara dengan seorang warga, 2019).

Pertemuan selanjutnya antara tim penilai jasa yang bertugas sebagai penilai lahan masyarakat, pertemuan tersebut untuk mengumumkan lahan masyarakat:

“Setelah identifikasi pada tahun 2018 diadakan lagi pertemuan antara tim penilai nilai dan masyarakat, pertemuan tersebut sempat terjadi konflik dikarenakan dalam undangan berisi mengenai pemberian kompensasi lahan, tetapi di dalam pertemuan tersebut berisikan tentang cara penilaian kompensasi, ada masyarakat yang protes karena tim penilai telah memberikan harga tanah bukan dari masyarakatnya sendiri ditambah tidak pernah membahas harga kami. Hingga akhirnya masyarakat membuat kelompok solidaritas yang bertujuan untuk menuntut nilai kompensasi yang tertutup dan sangat. Tim penilai juga mendesak lahan kami agar cepat diselesaikan dalam penilaian lahan kami hanya memakan waktu 15-20 menit. Kami yang menanyakan lahannya kepada tim penilai di jawaban dengan tim penilai bukan wewenang memberikan harga lahan tersebut, sehingga membuat harga lahan dirahasiakan” (Wawancara dengan seorang warga, 2019).

Beberapa pertemuan berikutnya ada musyawarah mengenai kompensasi tanah, antara DPRD Mempawah, PT. Pelindo dan Tim Penilai:

“Pertemuan tersebut kami disuruh menerima hasil kompensasi lahan, ketika kami menolak hasil dari kompensasi yang sepihak itu akan ditindaklanjuti dipihak pengadilan dan dilakukan secara tertutup. Kami yang menghadiri sidang merasakan kejanggalan antara PT. Pelindo dan Tim Penilai, kami merasa pihak hakim yang tidak serius menanggapi pendapat kami. Hingga akhirnya kami kalah dan permohonannya ditolak. Hasil akhir kami mendapatkan harga tanah antara Rp.200.000,- – Rp.300.000,- per meter. kami beranggapan bahwa adanya permainan dalam memberikan harga, ada sebagian masyarakat Desa Sungai Kunit masih bertahan didalam proses pembangunan pelabuhan tersebut” (Wawancara, 2019).

Bahwa pengompensasian lahan masyarakat Desa Sungai Kunit berupa uang Rp. 200.000.- – Rp.300.000,-. Untuk permeternya maupun barang tidak bisa menjamin kehidupan jangka Panjang masyarakat Desa Sungai Kunit. Penggusuran yang membuat putusnya mata rantai pencaharian kehidupan masyarakat serta hilangnya kebudayaan adat-istiadat di wilayah pedesaan. Pemerintah yang seharusnya menyelesaikan masalah konflik sosial ini dengan arif dan bijaksana agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan dengan keberadaan pelabuhan ini, jika masih ada penolakan yang menimbulkan konflik sosial maka dari itu untuk menyelesaikannya dengan pendekatan resolusi konflik model adjukasi.

Konflik dapat diselesaikan dengan metode resolusi konflik yang mewujudkan sebuah perdamaian di antara aktor konflik yang dimana menurut Kenneth W. Thomas dan Kilmann (Rahim,

1993) pada dasarnya resolusi konflik yang dilakukan tanpa kekerasan lebih efektif, salah satu model resolusi yang sangat disarankan untuk menyelesaikan ketika terjadinya konflik adalah adjukasi menggunakan cara penyelesaian perkara di pengadilan tindakan ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah. Dengan didasarkan aturan Undang-undang, keputusan Pemerintah Kota, Pemerintah daerah dan peraturan kebijakan pembangunan pelabuhan, dalam model resolusi konflik ini kedua pihak boleh terlibat dan menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan. Meskipun lahan yang terkena dampak pembangunan tersebut juga lahan milik pemerintah tetap saja harus mengompensasi secara relevan sesuai aturan yang berlaku (Sakinah, 2015).

## SIMPULAN

Adanya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, masyarakat Desa Kunyit Kabupaten Mempawah merasa dirugikan seperti lahan tanahnya di kompensasi dengan harga Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- per meter. Adapula dampak lainnya adalah nelayan yang menjadi perkerjaan yang strategis dalam mencari kebutuhan hidup menjadi terganggu serta ada yang berhenti menjadi nelayan karena laut yang biasa nelayan mencari ikan dijadikan tempat proses pembangunan pelabuhan bahkan berdampak pada sektor pertanian masyarakat, lahan pertanian masyarakat yang digusur dan dijadikan pembangunan pelabuhan. Pada proses kompensasi tanah pihak dari PT. Pelindo dan tim penilai mendesak tanah masyarakat Desa Sungai Kunyit agar cepat untuk dikosongkan dan mendesak memberi nilai tanah tanah masyarakat dengan perspektifnya tim penilai tanpa berdiskusi Panjang. Pemerintah sendiri kurang tegas dalam menindak kasus dampak dari kerugian masyarakat Desa Sungai Kunyit tersebut, bahkan pemerintah lebih condong mengarah kepada mendesak agar pembangunan pelabuhan Internasional Kijing cepat bisa difungsikan.

## REFERENSI

- Farichah, N. (2016). Konflik Antaraktor Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 223-232.
- Gatra.com. (2019). *Nelayan Tuntut Ganti Rugi Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing*. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/413419/millennials/nelayan-tuntut-ganti-rugi-pembangunan-pelabuhan-internasional-kijing>.
- Herlambang, Raydian. (2016). “Desain Developing Pelabuhan Tanjungbatu di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung dengan Penerapan Arsitektur menuju Konsep Tol Laut.” *Undergraduate Thesis*. Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <http://hdl.handle.net/123456789/1635>.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (n.d.). *Pengembangan Pelabuhan Kijing*. Retrieved from <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/h-proyek-pembangunan-pelabuhan-baru-dan-pengembangan-kapasitas/pengembangan-pelabuhan-kijing/>.
- Masudi, M. (2015). Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel. *Fikrah*, 3(1), 177-200.
- Moeis, Syarif. (2009). Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi dan Teori Dependensi. *Paper*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Oceanweek.co.id. (2019). *Penolakan Pembangunan Pelabuhan Kijing*. Retrieved from <https://oceanweek.co.id/penolakan-pembangunan-pelabuhan-kijing/>.
- Pahlevi, Aseanty. (2020). *Asa Warga Pertahankan Lahan Patah di Pengadilan, Pelabuhan Kijing Melaju*. Mongabay. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2020/05/04/asa-warga-pertahankan-lahan-patah-di-pengadilan-pelabuhan-kijing-melaju/>.
- Pahlevi, Aseanty. (2020). *Upaya Petani Bertahan di Tengah Proyek Infrastruktur*. Mongabay. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/upaya-petani-bertahan-di-tengah-proyek-infrastruktur/>.
- Fattah, A. N., & Purnomo, E. P. (2018). Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016 (Studi Kasus Kecamatan Ceper Kabupaten

- Klaten). *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 113-140. DOI: <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2774>.
- Rahmad, Adi. (2019). *Polemik Pembangunan Pelabuhan Kijing*. Mimbaruntan.com. Retrieved from <http://mimbaruntan.com/polemik-pembangunan-pelabuhan-kijing/>.
- Sakinah, Annisa. (2015). Perspektif Tentang Model Resolusi Konflik dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 177-186. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp3896915boifull.pdf>.
- Tarlitawati, Umi. (2019). *Nasib Nelayan Sungai Kuyit*. Mimbaruntan.com. Retrieved from <http://mimbaruntan.com/nasib-nelayan-sungai-kuyit/>.
- Tribun Mempawah. (2020). *Eksekusi Rumah Warga di Sungai Kuyit Tuai Banyak Peristiwa Penolakan Hingga Evakuasi Pakai Ambulan*. Retrieved from <https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/27/eksekusi-rumah-warga-di-sungai-kuyit-tuai-banyak-peristiwa-penolakan-hingga-evakuasi-pakai-ambulan?page=all>.
- Wahono, Djoko. (2015). Terminal Petikemas pada Pelabuhan Internasional Pantai Kijing di Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Arsitektur Untan*, 3(1), 37-55. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/206095/terminal-petikemas-pada-pelabuhan-internasional-pantai-kijing-di-kecamatan-sunga#cite>.